**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan informasi. Arsip pada umumnya berbentuk kertas dan di susun sesuai dengan tanggal serta jenisnya. Seiring berjalannya waktu, Instansi besar menghasilkan arsip yang semakin banyak karena kegiatan yang semakin luas dan kompleks. Dengan jumlah arsip yang meningkat dan kondisi dokumen yang terkadang tidak baik, menjadi sulit untuk mengelola arsip-arsip, hingga menyebabkan arsip dianggap sebagai tumpukan kertas yang tidak terpakai.

Setiap tahun, aktivitas Pemerintah dalam hal surat menyurat semakin bertambah menyebabkan banyaknya arsip baik surat masuk keluar yang memerlukan penggunaan kertas meningkat. Volume arsip yang terus meningkat menambah ruang penyimpanan arsip bagi instansi pemerintah. Namun tidak semua lembaga negara mempunyai ruang dan lahan yang cukup. Selain itu, jumlah pengelola arsip juga terbatas.

Hal ini membuat penerapan sistem pencatatan di organisasi menjadi tidak efektif. Apalagi bagi peminat arsip, proses pencariannya menjadi sangat sulit. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendigitalkan arsip dan mentransformasi pengelolaan arsip merupakan salah satu cara untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Karena permasalahan inilah pemerintah mulai berbenah dan agar instansi dapat melaksanakan tugas pelayanan masyarakatnya secara efektif dan efisien, arsip-arsip ini perlu dikelola dengan baik dan tepat. Seiring berjalannya waktu pemerintah mulai menemukan Solusi dari permasalahan yang dihadapi pihak kearsipan.

*e-Government* merupakan perkembangan yang pesat dan harus diikuti oleh sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satunya dalam bidang kearsipan. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE) sebagai landasan penerapan *e-Government* di Indonesia. Mengingat pengertian Perpres tersebut sebagai “pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” maka pada prinsipnya SPBE sendiri adalah *e-Government*. Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang tentunya membantu organisasi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu memfasilitasi pemberian layanan. Perkembangan teknologi dan informasi juga berdampak pada bidang pengelolaan arsip yang secara tradisional bersifat digital. Arsip digital memungkinkan pengguna dengan mudah mencari file dan informasi yang dikumpulkan untuk mendukung pekerjaan mereka. Arsip digital mempercepat proses pengambilan arsip.

Pada pertemuan yang diselenggarakan Selasa 27 Oktober 2020 Peluncuran aplikasi Srikandi merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hal ini merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, teknologi digital memungkinkan pemerintah mendokumentasikan Inovasi yang dilakukan pemerintah dalam penerapan SPBE khususnya adalah pengenalan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terpadu (Srikandi). Regulasi penerapan aplikasi Srikandi tertuang dalam Keputusan MENPAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) dan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Aplikasi Srikandi merupakan kolaborasi antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai pihak yang menyusun proses bisnis dan data/informasi pengelolaan arsip dinamis, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai koordinator dan penyusun regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) sebagai pihak yang mengembangkan aplikasi dan menyediakan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pihak yang menyediakan pengamanan aplikasi dan sertifikasi elektronik.

Tujuan dari peluncuran aplikasi Srikandi ini adalah untuk menciptakan kemudahan dalam penyelenggaraan persuratan dan arsip, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam kearsipan dan menjadi memori kolektif bangsa yang berbasis digital dan koordinasi antar pemerintah. Indonesia memiliki tingkat penggunaan kertas yang cukup tinggi. Terpantau pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat kesembilan sebagai produsen pulp terbesar di dunia dan peringkat keenam sebagai produsen kertas di dunia, menurut Kementerian Perindustrian Indonesia (Kemenperin). Tidak mengherankan bahwa para pemerhati lingkungan khawatir tentang produksi kertas yang tinggi dan masalah deforestasi hutan. Akhirnya, berbagai inisiatif untuk menghemat kertas bermunculan. Media digital sebagai pengganti kertas saat ini adalah salah satu metode yang paling umum digunakan.

Program *Paperless* memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, manfaat terbesar untuk perbaikan lingkungan, karena dapat mengurangi penebangan pohon, kita ikut berkontribusi untuk pelestarian lingkungan. Selain itu, berkurangnya pemakaian kertas juga mengurangi sampah kertas dan tinta kotor. *Paperless* juga terbukti dapat menghemat uang dalam banyak hal. Dengan digitalisasi, tentu saja anggaran yang awalnya digunakan untuk membeli alat tulis dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih efektif.

Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terpadu (Srikandi) yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan negara dari semua segi baik kemajuan teknologi maupun penghematan sumber daya, seperti beberapa penelitian terdahulu yang telah ada. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Kearsipan Dinamis Terpadu (Srikandi) sudah terimplementasi dengan baik walaupun ada beberapa yang mengatakan belum terimplementasi.

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terpadu (Srikandi) di launching pada 7 Februari 2023 dan mulai di uji coba untuk seluruh instansi di Kabupaten Tabalong, Pengarsipan surat menyurat mulai dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan sistem nasional yang memudahkan pemerintah daerah berkoordinasi dengan dengan pemerintah pusat. Selain itu daerah-daerah yang lumayan jauh dari Kota Kabupaten dapat berkoordinasi menggunakan surat menyurat elektronik, hal tersebut menambah efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintah yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Karena hal inilah penulis tertarik untuk mengulas lebih jauh bagaimana implementasi penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terpadu (Srikandi) di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah judul **“Implementasi Pengelolaan Arsip melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Bagian Organisasi”**

1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Implementasi Pengelolaan Arsip Melalui Aplikasi Srikandi Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong” yang objek utamanya merupakan Bagian Organisasi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

1. **Rumusan Masalah**

 Terkait dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Arsip melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Bagian Organisasi ?

1. **Tujuan Penelitian**

 Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Pengelolaan Arsip melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Bagian Organisasi.

1. **Manfaat Penelitian**

 Adapun penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
2. Penelitian ini mendukung teori George C. Edward III tentang Model Implementasi Kebijakan Publik memiliki empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakannya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain.
3. Mendukung penelitian terdahulu oleh (Aristriya, Dian & Tuswoyo, Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi) Sebagai Upaya Mitigasi Arsip Kebencanaan, 2024), (Syah Yudi & Pertiwi, Implementasi Srikandi Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, 2024), (Hadijah & Rahman, Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, 2024) tentang Pengelolaan Arsip Melalui Aplikasi Srikandi sudah terimplementasi serta tidak mendukung penelitian oleh (Dasnoer, Frinaldi, & Magriasti, Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, 2023) dan (Aini, Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2023) yang menyimpulkan bahwa Pengelolaan Arsip Melalui Aplikasi Srikandi belum terimplementasi.
4. Manfaat Praktis
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal pengimplementasian Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dalam menunjang proses kearsipan yang berbasis teknologi.
6. Sebagai menambah khazanah dalam memperkaya penelitian ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong khususnya pada Program Studi Administrasi Negara.